



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. CHOIRI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 12822

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/121 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.025.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/95 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.000.000

1. MOBIL, FORD SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, NISSAN EVALIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 3.507.000.000

III. HUTANG Rp. 270.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.237.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.